

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN  
PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN  
KLATEN**

**(Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014-  
2018)**

**RINGKASAN SKRIPSI**



**DISUSUN OLEH:**

**HAFIZH ABDURRAHMAN  
1116 29209**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
STIE YKPN YOGYAKARTA  
FEBRUARI 2021**

## SKRIPSI

### ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KLATEN (Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten tahun 2014-2018)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**HAFIZH ABDURRAHMAN**

No Induk Mahasiswa: 111629209

Telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 26 Februari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.

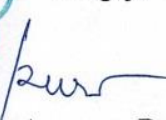
#### Susunan Tim Penguji:

Pembimbing



Lita Kusumasari, SE., MSA., Ak., CA.

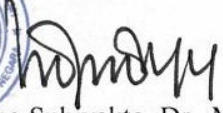
Penguji



Rusmawan Wahyu Anggoro, Dr., MSA., Ak., CA.

Yogyakarta, 26 Februari 2021  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta  
Ketua



  
Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Klaten. Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Klaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) efektivitas penerimaan pajak hotel selama tahun 2014-2018 termasuk dalam kategori sangat efektif, (2) efektivitas penerimaan pajak restoran selama tahun 2014-2018 termasuk dalam kategori sangat efektif, (3) efektivitas penerimaan pajak hiburan selama tahun 2014-2018 termasuk dalam kategori sangat efektif, (4) kontribusi penerimaan pajak hotel selama tahun 2014-2018 terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Klaten dalam kategori sangat kurang, (5) kontribusi penerimaan pajak restoran selama tahun 2014-2018 terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Klaten termasuk dalam kategori sangat kurang, dan (6) kontribusi penerimaan pajak hiburan pada tahun 2014-2018 terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Klaten dikategorikan sangat kurang.

Kata kunci: efektivitas pajak hotel, efektivitas pajak restoran, efektivitas pajak hiburan, kontribusi pajak daerah, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pendapatan asli daerah.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the contribution of hotel tax revenue, restaurant tax, and entertainment tax to the original revenue of Klaten Regency. The research method using descriptive research. Data that used are secondary data obtained from the Regional Financial Management Association of Klaten Regency. The results showed that (1) the effectivity of hotel tax revenue during 2014-2018 is categorized as very effective, (2) the effectivity of restaurant tax revenue during 2014-2018 is categorized as very effective, (3) the effectivity of entertainment tax revenue during 2014-2018 is categorized as very effective, (4) the contribution of hotel tax revenue during 2014-2018 to the Klaten Regency regional original income included in the category very less, (5) the contribution of restaurant tax revenue during 2014-2018 to the Klaten Regency regional original income included in the category very less, and (6) the contribution of entertainmen tax revenue in 2016-2018 is categorized as very less.*

*Keywords: The effectivity of hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, local tax contribution of hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, local original income.*

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## 1. Pendahuluan

Indonesia memiliki asas desentralisasi agar sistem pemerintahannya dapat terselenggara, melalui cara memberi kesempatan pada daerah agar dapat menyelenggarakan otonomi daerahnya sendiri. Otonomi daerah diharapkan agar dapat membuat kreasi-kreasi untuk mencari sumber-sumber penerimaan agar dapat membiayai segala kebutuhan pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan pembangunan didaerahnya.

Desentralisasi keuangan dan juga kebijakan otonomi daerah dapat memberi keterikatan antara pembagian urusan baik di pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bisa menggunakan cara memberi sumber keuangan untuk mendanai segala urusan yang ada di daerah. Daerah memiliki wewenang untuk mengelola sumberdaya yang ada agar dapat bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan yang ada sesuai dengan aturan perundangan.

Pajak dan retribusi daerah ialah sumber dari PAD menurut undang-undang No 28 tahun 2009 mengenai pajak dan retribusi daerah. Kontribusi wajib diberikan kepada daerah oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa dan tidak akan mendapat imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan daerah dalam memakmurkan masyarakat merupakan pengertian dari pajak daerah.

Tolak ukur pemerintah agar dapat melaksanakan otonomi daerah yang baik ialah adanya peran penting keuangan daerah pada Pendapatan Asli Daerah. Pada umumnya daerah dapat dikatakan berhasil untuk melakukan otonomi daerah apabila PAD dapat memberi sumbangan kepada APBD, dengan demikian diperlukannya perencanaan yang baik dan pengawasan terhadap sumber penerimaan dalam Pendapatan Asli Daerah tersebut.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kabupaten Klaten terletak pada Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai daya saing di bidang wisata, contohnya tempat wisata alam, seni budaya dan tempat bersejarah, akan tetapi potensi itu tidak diimbangi dengan penginapan yang memadai, di Kabupaten Klaten hanya terdapat 1 hotel mewah yaitu Hotel Grand Tjokro, dan sisanya hanya hotel melati. Oleh karena itu banyak wisatawan lebih memilih menginap di hotel-hotel yang berada di Yogyakarta dan Surakarta.

Pemerintah daerah perlu melakukan pengembangan di sektor hotel dan wisata dikarenakan potensi Kabupaten Klaten sebagai destinasi wisata sangat besar dan dapat menghasilkan banyak manfaat bagi masyarakat sekitar dan juga dapat berkontribusi pada PAD.

## 2. Kajian Pustaka

### Pendapatan Daerah

Hak daerah digunakan sebagai tambahan dari nilai kekayaan pada suatu periode anggaran tersebut merupakan pengertian Pendapatan daerah. Belanja daerah ialah suatu kegiatan wajib daerah yang berfungsi untuk mengurangi kekayaan bersih pada suatu periode anggaran yang bersangkutan. Pembiayaan daerah adalah suatu pendapatan yang wajib dilakukan untuk pembayaran kembali biaya yang mungkin diperoleh kembali pada suatu periode anggaran yang bersangkutan maupun pada periode selanjutnya.

Pendapatan daerah berguna untuk pembangunan dan pembiayaan yang dikeluarkan oleh suatu pemerintah daerah. Pendapatan daerah meliputi PAD, dana

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

perimbangan serta pendapatan daerah lain yang sah. Dana yang memiliki sumber dari APBN yang diberikan untuk suatu daerah agar dapat mencukupi keperluan daerah demi terlaksananya desentralisasi ialah pengertian dari dana perimbangan. Pendapatan daerah yang bersumber selain dari PAD dan dana perimbangan ialah pendapatan lain yang sah. Pemerintah Daerah yang dapat mengelola sumber pendapatan daerahnya dengan baik akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya.

## **Pendapatan Asli Daerah**

Suatu pendapatan diberikan kepada pemerintah daerah dan bersumber pada daerahnya sendiri berdasarkan peraturan daerah tersebut merupakan pengertian dari PAD. Menurut (Halim, 2011) PAD adalah penerimaan daerah dengan menggunakan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan ekonomi suatu daerah terdiri atas retribusi daerah, pajak daerah, hasil mengelola kekayaan daerah yang dapat dipisahkan serta PAD lain yang sah. PAD merupakan sarana untuk menambah dana yang berfungsi untuk mencukupi beragam kebutuhan suatu daerah.

## **Pajak Daerah**

Menurut (Djaenuri, 2012) pajak daerah ialah suatu pungutan yang dilakukan oleh pemerintahan di daerah terhadap wajib pajak yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung, bersifat memaksa sesuai ketentuan undang-undang demi kelancaran pembangunan suatu daerah dan terselenggaranya pemerintah daerah. Pajak provinsi dan pajak Kabupaten/kota merupakan macam dari pajak daerah.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pajak Provinsi meliputi pajak rokok dan pajak air permukaan, lalu pajak kendaraan dan juga bahan bakarnya serta pajak biaya balik nama kendaraannya. Pajak Kabupaten/Kota meliputi pajak bea perolehan dari tanah dan bangunan, lalu pajak lampu penerangan jalan, pajak hotel, pajak parker, PBB, pajak hiburan, pajak minieran bukan logam, pajak air tanah, pajak restoran, pajak reklame dan pajak sarang burung wallet.

Suatu penerimaan yang asalnya dari pajak provinsi maupun pajak kabupaten/kota dapat diketahui dari pendapatan yang dimiliki setiap daerah. PAD di Kab Klaten menunjukkan nilai yang fluktuatif di setiap tahun. Hal tersebut menunjukkan pajak daerah di Kabupaten Klaten belum terlalu berpengaruh terhadap PAD, maka dari itu pemerintah daerah Kabupaten Klaten harus mendorong pendapatan daerah melalui sektor wisata dan juga mendorong perkembangan hotel maupun dari sektor restoran agar pajak daerah dapat meningkat.

## **Pajak Hotel**

Suatu pajak yang diberikan atas layanan hotel merupakan istilah dari pajak hotel. Fasilitas yang menyediakan jasa penginapan termasuk jasa terkait lainnya seperti motel, *lossmen*, wisma, pesanggrahan, rumah penginapan, dan juga rumah kos yang memiliki kamar lebih dari 10 (sepuluh) ialah pengertian dari hotel.

## **Pajak Restoran**

Layanan yang diberikan oleh pihak restoran berupa pajak menurut perda Kab Klaten no 16 tahun 2011 ialah pengertian dari pajak restoran. Fasilitas yang dapat menyediakan baik makanan maupun minuman dengan sistem pembayaran



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

termasuk juga rumah makan, kantin, warung, bar dan juga jasa boga/katering ialah pengertian dari restoran.

## **Pajak Hiburan**

Perda Kabupaten Klaten menjelaskan bahwa pajak atas terselenggaranya sarana hiburan merupakan pengertian pajak Hiburan. Segala jenis pertunjukan dan tontonan permainan yang menyebabkan keramaian dan dapat dinikmati dengan cara membayar merupakan pengertian dari hiburan.

## **Kontribusi Pajak Hotel**

Besarnya penerimaan yang didapat dari pajak hotel yang dibandingkan dengan PAD merupakan pengertian kontribusi pajak hotel. Realisasi penerimaan pajak hotel dan realisasi PAD untuk tahun yang sama dapat memberikan informasi dasar pengenaan kontribusi penerimaan pajak hotel.

## **Kontribusi Pajak Restoran**

Besarnya penerimaan yang diperoleh dari pajak restoran lalu dibandingkan dengan PAD merupakan pengertian dari kontribusi pajak hiburan. Dasar pengenaan kontribusi pajak restoran diketahui dari realisasi penerimaan pajak restoran dan realisasi PAD untuk tahun yang sama.

## **Kontribusi Pajak Hiburan**

Besarnya suatu penerimaan yang diperoleh dari pajak hiburan yang dibandingkan dengan PAD merupakan pengertian dari kontribusi pajak hiburan.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dasar pengenaan kontribusi pajak hiburan dapat diketahui dari nilai realisasi penerimaan pajak hiburan dan nilai realisasi penerimaan PAD pada periode yang bersangkutan.

## **Efektivitas Pajak Daerah**

Pemanfaatan sumber daya dan juga sarana yang sudah ditentukan sebelumnya agar mencapai hasil yang baik merupakan pengertian dari efektivitas. Analisis yang menggambarkan apakah pemerintah daerah mampu untuk merelaisasikan PAD yang sudah direncanakan sebelumnya lalu dibandingkan target yang sudah ditentukan merupakan pengertian analisis efektivitas pajak daerah.

### **3. Hipotesis Penelitian**

Penelitian dari (Pane, 2016) berjudul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak Tahun 2010-2014” Memberikan hasil bahwa penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di Kota Pontianak sangat efektif dalam memberikan kontribusi pada PAD Kota Pontianak. Hipotesis yang didapat yaitu:

H1: Efektivitas Pajak Hotel memiliki pengaruh terhadap PAD di Kab Klaten.

H2: Efektivitas Pajak Restoran memiliki pengaruh terhadap PAD di Kab Klaten.

H3: Efektivitas Pajak Hiburan memiliki pengaruh terhadap PAD di Kab Klaten.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penelitian yang dilakukan oleh (Fahreja, Yani, & Lubis, 2017) tentang “Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap PAD Kota Langsa” memberikan kesimpulan bahwa keseluruhan rata-rata kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap PAD di Kota Langsa sangat kurang. Hipotesis yang didapatkan yaitu:

H4: Kontribusi Pajak Hotel berpengaruh terhadap PAD di Kab Klaten.

H5: Kontribusi Pajak restoran berpengaruh terhadap PAD di Kab Klaten.

H6: Kontribusi Pajak Hiburan berpengaruh terhadap PAD di Kab Klaten.

## 4. Metode Penelitian

### Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis statistik deskriptif dengan menggunakan data Kuantitatif yang diperoleh dan digunakan untuk penelitian dan perhitungan dari efektivitas penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan serta menghitung kontribusi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan pada PAD di Kab Klaten pada tahun 2014-2018.

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Klaten khususnya pada Badan Pusat Statistik Kab Klaten dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab Klaten yang memiliki lokasi di Jl.Pemuda No 294, Dusun 1, Tegalyoso, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Jawa tengah.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Waktu Penelitian

Waktu penelitian merupakan waktu saat terselenggaranya penelitian. Penelitian ini dibulai dari bulan Oktober 2020 ketika peneliti mengumpulkan data sebagai bahan penelitian. Waktu pengerjaan penelitian ini diteliti selama enam bulan yang akan berakhir pada bulan februari 2021.

## Sampel Penelitian

Bagian dari subyek maupun obyek berkualitas dan memiliki karakteristik yang akan diteliti agar dapat disimpulkan merupakan pengertian populasi. Populasi yang diteliti yaitu berada di Kabupaten Klaten khususnya pada Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Sampel merupakan anggota populasi yang memiliki jumlah tertentu dan mempunyai karakteristik tertentu. Sampel yang diterapkan pada penelitian ini ialah penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan dan PAD Kab Klaten periode 2014-2018.

## Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik:

- a. Studi Lapangan yaitu dilakukan langsung mengunjungi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Klaten untuk mendapatkan data yang diperlukan;
- b. Dokumentansi yaitu memperoleh dengan cara mengumpulkan dokumen, buku dan arsip yang diperoleh langsung yang berkaitan dengan penelitian yang berada di *web*.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Suatu yang dapat dijadikan sebagai objek pengamatan didalam penelitian merupakan variabel penelitian. Definisi operasional variabel merupakan variabel yang menggambarkan makna dan prosedur untuk mengukur variabel tersebut.

Variabel yang digunakan yaitu:

### 1. Variabel Dependen

Variabel yang dapat mempengaruhi adanya variabel bebas merupakan variabel dependen. Variabel terikat yang dipakai dalam penelitian ini ialah PAD Kab Klaten yang memiliki pengertian penerimaan daerah yang bersumber dari daerahnya sendiri yang didasarkan atas peraturan daerah.

### 2. Variabel Independen

Variabel yang berupa penyebab perubahan atau variabel yang bersifat mempengaruhi variabel dependen ialah variabel bebas. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### a. Efektivitas Pajak Hotel

Nilai yang dihasilkan dari penerimaan pajak hotel atas tercapainya target yang telah ditentukan merupakan pengertian efektivitas pajak hotel.

#### b. Efektivitas Pajak Restoran

Nilai yang dihasilkan dari penerimaan pajak restoran atas tercapainya target yang telah ditetapkan merupakan pengertian efektivitas pajak restoran.

#### c. Efektivitas Pajak Hiburan

Nilai yang dihasilkan dari pajak hiburan atas tercapainya target yang telah ditetapkan merupakan pengertian dari efektivitas pajak hiburan.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## d. Kontribusi Pajak Hotel

Kemampuan pajak hotel untuk memberi sumbangan kepada penerimaan PAD merupakan pengertian dari Kontribusi Pajak Hotel.

## e. Kontribusi Pajak Restoran

Kemampuan pajak restoran untuk memberi sumbangan kepada penerimaan PAD ialah pengertian dari Kontribusi Pajak Restoran.

## f. Kontribusi Pajak Hiburan

Kemampuan pajak hiburan untuk memberi sumbangan kepada penerimaan PAD merupakan pengertian dari kontribusi pajak hiburan.

### Metode dan Teknik Analisis

Metode yang di pakai ialah metode analisis data deskriptif kuantitatif, dengan cara mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data yang didapat agar bisa menghasilkan kesimpulan dalam bentuk rasio.

### Analisis Efektivitas

Hubungan yang terjadi antara keluaran dengan sasaran yang harus dicapai merupakan pengertian dari analisis efektivitas. Rumus yang digunakan yaitu:

#### 1. Efektivitas Pajak Hotel

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

#### 2. Efektivitas Pajak Restoran

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\%$$

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

### 3. Efektivitas Pajak hiburan

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hiburan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hiburan}} \times 100\%$$

kriteria efektivitas dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.1  
Kriteria Efektivitas

Presentase Efektivitas	Keterangan
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 thn 1994

### Analisis Kontribusi

Analisis yang dipergunakan agar dapat diketahui seberapa besar kontribusi yang diberikan dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap PAD. Rumus yang dipakai untuk menghitung kontribusi yaitu:

#### 1. Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel:

$$\text{Analisis Kontribusi Pajak hotel: } \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

#### 2. Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran:

$$\text{Analisis Kontribusi Pajak Restoran: } \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## 3. Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan:

$$\text{Analisis Kontribusi Pajak Hiburan: } \frac{\text{Realisasi Pajak Hiburan}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Menurut (Halim, 2011) Kriteria kontribusi dapat disajikan pada tabel berikut ini

Tabel 3.2  
Kriteria Kontribusi

Kontribusi %	Kriteria Kontribusi
> 50%	Sangat Baik
40,1%-50%	Baik
30,1%-40%	Cukup Baik
20,1%-30%	Sedang
10%-20%	Kurang Baik
< 10%	Sangat Kurang

Sumber: (Halim, 2011)

## 5. Analisis Data dan Pembahasan

### Analisis Efektivitas Pajak Hotel

Tabel 4.1

Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel Tahun 2014-2018

Tahun	Pajak Hotel		Rasio Efektivitas	Kategori
	Target	Realisasi		
2014	Rp 600.000.000	Rp 720.156.384	120,03%	Sangat Efektif
2015	Rp 775.000.000	Rp 799.163.643	103,12%	Sangat Efektif
2016	Rp 845.000.000	Rp 854.458.795	101,12%	Sangat Efektif
2017	Rp 950.000.000	Rp 1.034.439.307	108,89%	Sangat Efektif
2018	Rp 1.050.000.000	Rp 1.114.743.863	106,17%	Sangat Efektif
Rata-rata			107,86%	Sangat Efektif

Tabel 4.1 menjelaskan rerata rasio efektivitas pajak hotel Kabupaten Klaten tahun 2014-2018 sebesar 107,86% dan mempunyai kategori sangat efektif



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dikarenakan dapat menunjukkan rasio diatas 100%. Rasio efektivitas di tahun 2014 sebesar 120,03% dengan kategori sangat efektif, lalu pada tahun 2015 mengalami penurunan rasio efektivitas sebesar 103,12% akan tetapi masih berkategori sangat efektif, lalu pada tahun 2016 juga mengalami penurunan rasio efektivitas sebesar 101,12% tetapi masih dalam kategori sangat efektif, pada tahun 2017 rasio efektivitas mengalami peningkatan yaitu 108,89% berkategori sangat efektif, dan pada tahun 2018 mengalami penurunan rasio efektivitas sebesar 106,17% dan memiliki kategori sangat efektif

## Analisis Efektivitas Pajak Restoran

Tabel 4.2  
Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran Tahun 2014-2018

Tahun	Pajak Restoran		Rasio Efektivitas	Kategori
	Target	Realisasi		
2014	Rp 1.395.000.000	Rp 1.949.807.473	139,77%	Sangat Efektif
2015	Rp 2.080.000.000	Rp 3.016.358.884	145,02%	Sangat Efektif
2016	Rp 2.190.000.000	Rp 3.008.136.618	137,36%	Sangat Efektif
2017	Rp 2.300.000.000	Rp 3.683.044.791	160,13%	Sangat Efektif
2018	Rp 4.500.000.000	Rp 5.435.763.295	120,79%	Sangat Efektif
	Rata-rata		140,61%	Sangat Efektif

Tabel 4.2 menjelaskan rerata rasio efektivitas penerimaan pajak restoran Kabupaten Klaten tahun 2014-2018 sebesar 140,61% berkategori sangat efektif dikarenakan dapat menghasilkan rasio diatas 100%. Pada tahun 2014 memiliki rasio efektivitas sebesar 139,77% berkategori sangat efektif, lalu tahun 2015 mengalami peningkatan rasio efektivitas menjadi 145,02% dengan kategori sangat efektif. Pada tahun 2016 mengalami penurunan rasio efektivitas sebesar 137,36% dengan kategori sangat efektif, lalu tahun 2017 mengalami peningkatan rasio efektivitas cukup besar menjadi 160,13% dengan kategori sangat efektif, dan pada

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tahun 2018 mengalami penurunan kembali rasio efektivitas menjadi 120,79% berkategori sangat efektif.

## Analisis Efektivitas Pajak Hiburan

Tabel 4.3

Perhitungan Efektivitas Pajak Hiburan Tahun 2014-2018

Tahun	Pajak Hiburan		Rasio Efektivitas	Kategori
	Target	Realisasi		
2014	Rp 338.000.000	Rp 387.128.516	114,54%	Sangat Efektif
2015	Rp 395.000.000	Rp 546.132.592	138,26%	Sangat Efektif
2016	Rp 500.000.000	Rp 598.945.211	119,79%	Sangat Efektif
2017	Rp 750.000.000	Rp 956.975.284	127,60%	Sangat Efektif
2018	Rp 950.000.000	Rp 954.219.658	100,44%	Sangat Efektif
	Rata-rata		120,13%	Sangat Efektif

Tabel 4.3 menjelaskan rerata rasio efektivitas penerimaan pajak hiburan Kab Klaten pada tahun 2014-2018 yaitu sebesar 120,13% berkategori sangat efektif dikarenakan rasionya berada diatas 100%. Tahun 2014 rasio efektivitas pajak hiburan menunjukkan angka 114,54% berkategori sama dengan sebelumnya. Tahun 2015 mengalami peningkatan rasio efektivitas menjadi 138,26% dan berkategori sama dengan tahun lalu. Tahun 2016 rasio efektivitas mengalami penurunan menjadi 119,79% berkategori sangat efektif dan tahun 2017 kembali mengalami peningkatan rasio efektivitas menjadi 127,60% dengan kategori sangat efektif, lalu tahun 2018 rasio efektivitas menjadi 100,44% dan mengalami penurunan dengan kategori yang sama yaitu sangat efektif.

## Analisis Kontribusi Pajak Hotel

Tabel 4.4

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap PAD  
Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi PAD	Persentase Kontribusi	Kategori Kontribusi
2014	Rp 720.156.384	Rp 177.923.016.860	0,40%	Sangat Kurang
2015	Rp 799.163.643	Rp 190.622.670.128	0,42%	Sangat Kurang
2016	Rp 854.458.795	Rp 224.197.408.481	0,38%	Sangat Kurang
2017	Rp 1.034.439.307	Rp 371.718.439.306	0,28%	Sangat Kurang
2018	Rp 1.114.743.863	Rp 395.884.245.000	0,28%	Sangat Kurang
Rata-rata			0,35%	Sangat Kurang

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten diolah

Tabel 4.4 menggambarkan kontribusi penerimaan pajak hotel dari tahun 2014-2018 terjadi secara fluktuatif setiap tahunnya dengan persentase kontribusi 0,35% dan mempunyai kategori sangat kurang. Kontribusi penerimaan pajak hotel tahun 2014 memiliki persentase 0,40% berkategori sangat kurang, persentase kontribusi penerimaan pajak hotel tahun 2015 meningkat menjadi 0,42% berkategori sangat kurang. Persentase kontribusi di tahun 2016 kembali mengalami penurunan menjadi 0,38% dengan kategori sangat kurang, lalu pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan persentase menjadi 0,28% berkategori sangat kurang. Persentase kontribusi tahun 2018 sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,28% berkategori sangat kurang. Sesuai dengan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kontribusi penerimaan pajak hotel pada tahun 2014-2018 berkategori sangat kurang terhadap PAD Kab Klaten. Kontribusi penerimaan pajak hotel dikatakan sangat kurang dikarenakan banyaknya wisatawan dari luar kota lebih memilih menginap atau bermalam di hotel yang berada di Yogyakarta ataupun Kota Solo karena hotel yang disediakan di Kabupaten Klaten kurang memenuhi standar dan kebanyakan hanya *lossmen* sedangkan di Yogyakarta maupun Kota Solo banyak hotel yang memadai dan lebih mudah di akses melalui aplikasi online. Adapun alasan lain mengapa

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

wisatawan memilih penginapan/hotel yang berada di Yogyakarta dan Kota Solo karena dekatnya akses ke bandara sedangkan di Klaten tidak ada bandara, itulah yang menyebabkan hanya sedikit pengunjung hotel di Kabupaten Klaten yang dapat menyebabkan rendahnya penerimaan pajak hotel.

## Analisis Kontribusi Pajak Restoran

Tabel 4.5  
Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap PAD  
Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi PAD	Persentase Kontribusi	Kategori Kontribusi
2014	Rp 1.949.807.473	Rp 177.923.016.860	1,10%	Sangat Kurang
2015	Rp 3.016.358.884	Rp 190.622.670.128	1,58%	Sangat Kurang
2016	Rp 3.008.136.618	Rp 224.197.408.481	1,34%	Sangat Kurang
2017	Rp 3.683.044.791	Rp 371.718.439.306	0,99%	Sangat Kurang
2018	Rp 5.435.763.295	Rp 395.884.245.000	1,37%	Sangat Kurang
Rata-rata			1,28%	Sangat Kurang

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Klaten diolah

Tabel 4.5 memperlihatkan hasil dari perhitungan kontribusi penerimaan pajak restoran tahun 2014-2018 terjadi secara fluktuatif setiap tahunnya dan mempunyai rerata persentase kontribusi penerimaan sebesar 1,28% berkategori sangat kurang. Kontribusi penerimaan pajak restoran di tahun 2014 berpersentase sebesar 1,10% berkategori sangat kurang. Tahun 2015 mengalami peningkatan persentase menjadi 1,58% berkategori sangat kurang. Persentase kontribusi pada tahun 2016 menurun menjadi 1,34% berkategori sangat kurang. Tahun 2017 persentase kontribusi kembali mengalami penurunan menjadi 0,99% dan berkategori sangat kurang, dan tahun 2018 persentase kontribusi kembali mengalami peningkatan menjadi 1,37% dengan kategori sangat kurang. Berdasarkan data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kontribusi penerimaan pajak restoran selama tahun 2014-2018 dapat dikategorikan sangat kurang setiap

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tahunnya terhadap PAD Kab Klaten. Kontribusi penerimaan pajak restoran dikatakan sangat kurang dikarenakan kurangnya peminat makanan di restoran, kebanyakan para pengunjung kuliner lebih memilih ke warung-warung pinggir jalan yang tidak membayarkan pajak restoran, warung pinggir jalan hanya membayar retribusi ke pihak-pihak daerah tempat mereka berjualan. Kurangnya inovasi makanan dan harga yang jauh lebih mahal di restoran juga menjadi alasan kenapa kurangnya pengunjung di restoran yang berada di Kabupaten Klaten. Kurangnya promosi ataupun iklan bagi restoran juga menyebabkan tidak banyaknya pengunjung di restoran.

## Analisis Kontribusi Pajak Hiburan

Tabel 4.6  
Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap PAD  
Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan	Realisasi PAD	Persentase Kontribusi	Kategori Kontribusi
2014	Rp 387.128.516	Rp 177.923.016.860	0,22%	Sangat Kurang
2015	Rp 546.132.592	Rp 190.622.670.128	0,29%	Sangat Kurang
2016	Rp 598.945.211	Rp 224.197.408.481	0,27%	Sangat Kurang
2017	Rp 956.975.284	Rp 371.718.439.306	0,26%	Sangat Kurang
2018	Rp 954.219.658	Rp 395.884.245.000	0,24%	Sangat Kurang
Rata-rata			0,21%	Sangat Kurang

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Klaten diolah

Tabel 4.6 menggambarkan kontribusi pajak hiburan tahun 2014-2018 menghasilkan perhitungan yang sangat kecil dan terjadi secara fluktuatif pada setiap tahun dengan rerata persentase kontribusi 0,21% berkategori sangat kurang. Kontribusi penerimaan pajak hiburan pada tahun 2014 memiliki persentase 0,22% berkategori sangat kurang. Tahun 2015 persentase kontribusi penerimaan pajak hiburan mengalami kenaikan menjadi 0,29% dengan kategori sangat kurang, kenaikan ini terjadi karena banyaknya tempat wisata yang baru dibangun misalnya

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

umbul-umbul yang berada di Kabupaten Klaten. Tahun 2016 persentase kontribusi penerimaan pajak hiburan kembali turun menjadi 0,27% dengan kategori sangat kurang. Persentase kontribusi penerimaan pajak hiburan di tahun 2017 kembali mengalami penurunan menjadi 0,26% dengan kategori sangat kurang dan di tahun 2018 persentase penerimaan pajak hiburan kembali turun menjadi 0,24% dengan kategori sangat kurang. Dari perhitungan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kontribusi penerimaan pajak hiburan dari tahun 2014-2018 terus menerus dalam kategori sangat kurang terhadap PAD di Kab Klaten. Kontribusi penerimaan pajak hiburan dikatakan sangat kurang diakibatkan belum berkembangnya pariwisata dan kurangnya promosi yang dilakukan oleh pemilik wahana wisata di Kabupaten Klaten yang menyebabkan sedikitnya pengunjung wisata. Akses menuju tempat wisata pun masih kurang sehingga para pengunjung hanya sesekali datang ke tempat wisata tersebut.

## 6. Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

1. Efektivitas penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan pada Kabupaten Klaten pada tahun 2014-2018 secara rerata termasuk kategori sangat efektif (>100%)
2. Kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap PAD Kabupaten Klaten sangat kurang.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Kontribusi penerimaan pajak daerah pada PAD di Kab Klaten selama tahun 2014-2018 memiliki rata-rata sebesar 32,5% dan berkategori cukup baik.

## Saran

1. Pemerintah daerah Kab Klaten harus lebih sering untuk melakukan sosialisasi agar dapat meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak baik pribadi ataupun badan agar penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan bisa maksimal lagi.
2. Pemerintah Kabupaten Klaten diharap meningkatkan promosi wisata di Kabupaten Klaten
3. Diharapkan bagi pengelola hotel dapat meningkatkan fasilitas dan swadaya hotelnya.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## DAFTAR PUSTAKA

- Asriat, & Warda. (2017). EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN. *Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, Volume 13 No 2*.
- [BPKD] Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Klaten. 2014-2018. *Feedback Pendapatan Asli Daerah 2014-2018*
- [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten. 2015. *Klaten Dalam Angka Tahun 2014*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten. 2016. *Klaten Dalam Angka Tahun 2015*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten. 2017. *Klaten Dalam Angka Tahun 2016*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten. 2018. *Klaten Dalam Angka Tahun 2017*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten. 2019. *Klaten Dalam Angka Tahun 2018*.
- Fahreja, Z. A., Yani, R., & Lubis, N. K. (2017). Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi, 3(2)*.
- Ghozali, Imam. 2011. *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: BP Univertas Dipenogoro.
- Halim, Abdul. 2011. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Lasmini, & Astuti, W. (2019, Juni). Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman Tahun 2015-2016. *EBBANK, Vol. 10 No. 1, 29-40*.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.
- Pane, M. R. (2016). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap PAD di Kota Pontianak. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN Vol 5 No 4*.



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Peraturan Bupati No. 78 Tahun 2019 Tentang Sistem Monitoring Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah Secara *Online*.

Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Widodo, W. I., & Guritno, B. (2017). PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTAURAN DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA YOGYAKARTA. *Jurnal Visi Manajemen, Vol 2 No 2*.

